

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Submission date: 06-Sep-2024 04:44PM (UTC+0700)
by Neneng Widowati

Submission ID: 2446440380

File name: Jurnal_Nuansa_-_Neneng_Widowati_1.docx (184.51K)

Word count: 6544

Character count: 44101

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Neneng Widowati ¹, Deden Mulyana ^{2*}, Apip Supriadi ³

^{1,2,3} Magister Manajemen, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

Alamat: Magister Manajemen, Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kec.
Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat

*Korespondensi penulis: dedenmulyana@unsil.ac.id

Abstract. *This research aims to determine and analyze the influence of local revenue, general allocation funds, special allocation funds, profit sharing funds and population on financial performance. The study was conducted at district/city governments in West Java Province in 2014-2023. The sample size was set at 27 districts/cities with observation data from 2014 to 2023. The type of data used is secondary data in the form of panel data. The data analysis technique used is multiple linear regression with the Eviews application. The results of this research show that: 1) local original income, special allocation funds, profit sharing funds, population and regional government financial performance have an increasing trend. Meanwhile, general allocation funds have a downward trend; 2) local original income, general allocation funds, special allocation funds, profit sharing funds and population simultaneously influence the financial performance of regional governments; 3) Original regional income has a positive and significant effect on regional government financial performance. General allocation funds and population have an insignificant negative effect on local government financial performance. Special allocation funds have a negative and significant effect on local government financial performance. Profit sharing funds have an insignificant positive effect on local government financial performance.*

Keywords: *Local Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Population, Regional Financial Performance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan. Studi dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023. Ukuran sampel ditetapkan sebanyak 27 kabupaten/kota dengan data pengamatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bentuk data panel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan aplikasi Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, jumlah penduduk dan kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki tren meningkat. Sedangkan dana alokasi umum memiliki tren menurun; 2) pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; 3) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi umum dan jumlah penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, Kinerja Keuangan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah dalam era reformasi sangat penting dilaksanakan dan perlu ditingkatkan karena merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga tidak dapat terlepas dari prinsip otonomi daerah. Kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah itu sangat penting untuk dilaksanakan, karena dengan terlaksananya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat, sehingga akan lebih efektif dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahann daerah, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini. Sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

APBD merupakan program kerja pemerintah daerah yang berisi rencana pendapatan dan pengeluaran selama periode satu tahun. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Kuangan Daerah, menyatakan bahwa belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Kinerja keuangan daerah merujuk pada sejauh mana pemerintah memanfaatkan anggaran belanja daerah untuk keperluan pembangunan daerah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam (Ambya, 2023: 94). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai anggaran guna kepentingan pembangunan suatu daerah. Berikut ini merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami perubahan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

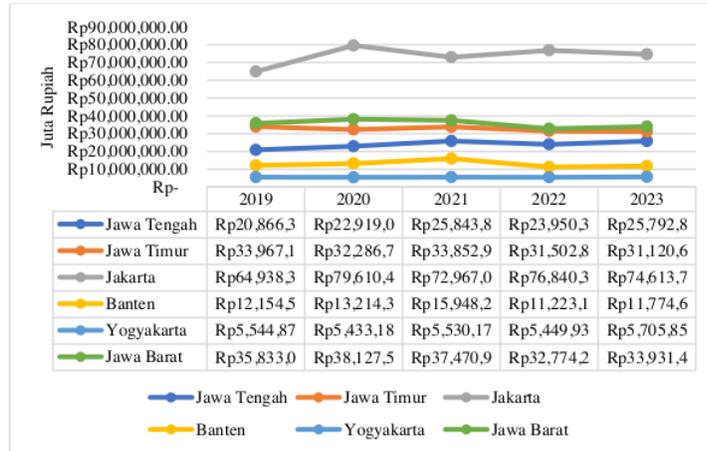
Tabel 1 APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja
2019	39.111.008.407.298	35.833.086.126.516
2020	43.263.671.357.326	38.127.531.749.249
2021	39.431.760.292.994	37.470.910.437.064
2022	34.105.173.644.759	32.774.222.386.723

Sumber: Dokumen PPID Jawa Barat.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 sebesar 35.833.086.126.516 , lalu mengalami peningkatan pada tahun 2020 sehingga menjadi 38.127.531.749.249. Tetapi pada tahun 2021 realisasi belanja mengalami penurunan menjadi 37.470.910.437.064, mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sehingga realisasi anggaran menjadi 32.774.222.386.723. Penurunan dan peningkatan jumlah realisasi anggaran, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Semakin meningkatnya pendapatan daerah maka semakin meningkat pula belanja daerahnya.

Jumlah belanja daerah Provinsi Jawa Barat apabila dibandingkan dengan seluruh Provinsi yang ada di pulau Jawa, dapat dilihat pada Gambar 1, sebagai berikut.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024.

Gambar 1 Besaran Belanja Daerah Provinsi di Pulau Jawa 2019-2023

Berdasarkan Gambar 1 di atas, jumlah belanja daerah Provinsi Jawa Barat berada di posisi kedua terbesar apabila dibandingkan dengan Provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa. Jumlah belanja daerah Provinsi Jawa Barat berada di bawah Provinsi DKI Jakarta dan berada di atas Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pembentukan Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang berasal dari pusat.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Hal ini mengingat bahwa pengalokasian belanja daerah sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah baik itu dari sumber pendapatan daerah yaitu PAD maupun bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH. Dengan begitu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakatnya. PAD, DAU, DAK, dan DBH merupakan pendapatan daerah yang akan digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berikut ini merupakan data penerimaan PAD, DAU, DAK dan DBH Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2019-2022, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 PAD, DAU, DAK dan DBH Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2019-2022

Sumber Penerimaan	Anggaran			
	2019	2020	2021	2022
PAD	21.244.266.598.017	18.521.882.178.042	20.333.679.966.126	23.249.622.253.957
DAU	3.212.647.404.000	2.964.612.155.000	3.007.928.119.000	2.981.692.750.817
DAK	10.018.939.410.784	10.853.697.316.005	10.886.719.042.417	4.731.465.873.851
DBH	1.483.785.231.865	2.063.105.718.266	2.594.483.012.137	2.107.890.742.700
Total	35.959.638.644.666	34.403.297.367.313	36.822.810.139.680	33.070.671.621.325

Sumber: Dokumen PPID Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa sumber penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami perubahan, untuk tahun 2019 menunjukkan angka sebesar Rp. 35.959.638.644.666. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.556.341.277.353. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.419.512.772.367 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.752.138.518.355. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Rohmah, 2021: 26).

PAD dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. Namun, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan/ kontribusi PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/ kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Disamping itu jumlah penerimaan asli daerah dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Padang dan Padang, 2023) dan (Amaradila, Hartono, dan Ardiana, 2023).

Disamping itu Dana Alokasi Umum merupakan komponen penerimaan pemerintah, yang menjadi salah satu faktor besar kecilnya penerimaan pemerintah. Dana Alokasi Umum (DAU) sendiri merupakan dana yang alokasinya bertujuan untuk menciptakan kemampuan keuangan yang sama rata antara satu daerah dan daerah lain. Terlebih dalam aspek pemenuhan kebutuhan desentralisasi di daerah tersebut. Penggunaan DAU diarahkan untuk kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum (Oki, 2023: 159).

Disamping itu besarnya dana alokasi umum dapat memengaruhi kinerja keuangan suatu daerah, karena menjadi salah satu faktor penerimaan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Ismayasari, Ariessa, dan Budi, 2024; Fintari, 2020).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang alokasinya bertujuan membiayai program-program khusus daerah yang sesuai dengan prioritas negara. Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Oki, 2023: 160). Disamping itu penerimaan suatu daerah dapat ditunjang, salah satunya oleh dana alokasi khusus, yang mana ini dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan, menyimpulkan bahwa dana alokasi

khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Pradana dan Handayani, 2023; Ardhana, 2023).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (Sadat, 2022: 124). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan, mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Ihsan, 2020; Ismayasari dkk, 2024).

Jumlah penduduk mampu memengaruhi belanja daerah, mengingat bahwa jumlah penduduk mampu memengaruhi besar kecilnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Mardiasmo dalam (Andirfa, 2018: 14), salah satunya penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD, untuk keperluan belanja daerah. Dimana belanja daerah itu difokuskan untuk pembangunan suatu daerah, sehingga besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Cut, 2021; Kusumaningrum dan Sugiyanto, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Rohmah, 2021: 26).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang alokasinya bertujuan untuk menciptakan kemampuan keuangan yang sama rata antara satu daerah dan daerah lain. Terlebih dalam aspek pemenuhan kebutuhan desentralisasi di daerah tersebut. Penggunaan DAU diarahkan untuk kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka

peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum (Oki 2023: 159).

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Indonesia 2004).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang alokasinya bertujuan membiayai program-program khusus daerah yang sesuai dengan prioritas negara. Tujuannya adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Oki, 2023: 160). Menurut, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Indonesia, 2004).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (Sadat, 2022: 124). Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Indonesia, 2004).

Demografi merupakan struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi : jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu : kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan migrasi penduduk (Amna, 2022: 2). Sumber lain menyebutkan bahwa demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status) Hauser dalam (Alma, 2019: 1).

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjelaskan sejauh mana pemerintah daerah untuk memanfaatkan alokasi dana untuk pembangunan daerah. Kinerja adalah

keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam (Ambya, 2023: 94). Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat Syamsi dalam (Ambya, 2023: 94).

3. METODE PENELITIAN

Studi dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023. Dimana variabel independen pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah X1, dana alokasi umum X2, dana alokasi khusus X3, dana bagi hasil X4 dan jumlah penduduk X5, serta variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah Y. Ukuran sampel ditetapkan sebanyak 27 kabupaten/kota dengan data pengamatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bentuk data panel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan aplikasi Eviews.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data penelitian pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, tahun 2014-2023. Dilakukan uji pemilihan model dengan tahap uji *chow*, uji *hausman* dan uji LM. Berikut ini merupakan data hasil uji *chow*, dapat dilihat pada Tabel 3, berikut ini.

Tabel 3 Data Hasil Uji Chow

No	Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
1	Cross-section	Chi-square	193.481627	26	0.0000

Sumber: Data sekunder, diolah Eviews, 2024

Berdasarkan hasil uji *chow* pada Tabel 4.7, nilai probabilitas sebesar $0.00 < 0,05$, maka model terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

Dilakukannya uji Hausman dengan hasil dapat dilihat pada Tabel 4, sebagai berikut.

Tabel 4 Data Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
--------------	-------------------	--------------	-------

<i>Cross-section random</i>	69.603687	5	0.0000
-----------------------------	-----------	---	--------

Sumber: Data sekunder, diolah Eviews, 2024

Berdasarkan hasil uji *huasman* pada Tabel 4, nilai probabilitas sebesar sebesar $0.00 < 0,05$, maka model terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

Berdasarkan hasil uji *chow* dan uji *hausman*, dengan hasil bahwa hipotesis diterima yang ditandai dengan nilai probabilitas $< 0,05$. Maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*, sehingga tidak perlu untuk melakukan uji LM.

Metode estimasi model panel pengaruh tetap *fixed effect model* menggunakan *ordinary least square* (OLS) Gujarati dalam (Kosmaryat dkk, 2019). Model regresi *common effect model* atau *fixed effect model* maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dibutuhkan untuk data panel adalah multikolinieritas dan uji heterokedastisitas Gujarati dalam (Kosmaryat dkk, 2019). Berikut ini merupakan data hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.10, sebagai berikut.

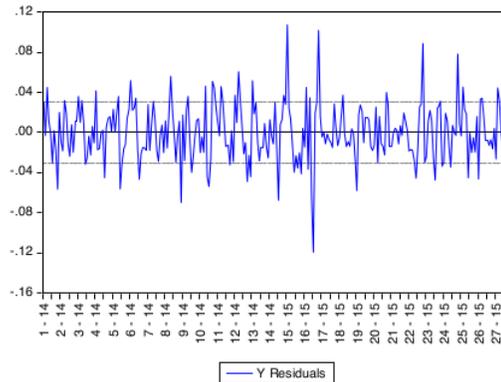
Tabel 5 Data Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1.000	0.444	0.389	0.673	0.763
X2	0.444	1.000	0.629	0.563	0.794
X3	0.389	0.629	1.000	0.381	0.523
X4	0.673	0.563	0.381	1.000	0.692
X5	0.763	0.794	0.523	0.692	1.000

Sumber: Data sekunder, diolah Eviews, 2024

Merujuk pada data di atas, nilai korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,85, maka dapat disimpulkan lolos uji multikolinieritas.

Dilakukannya uji heteroskedastisitas, dengan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1, sebagai berikut.



Sumber: Data sekunder, diolah Eviews, 2024

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 2, nilai residual graph berada pada rentang 500 sampai -500. Maka dapat disimpulkan lolos uji heteroskedastisitas.

Berdasarkan data hasil penelitian pada variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Dilakukannya regresi linier dengan persamaan regresi, sebagai berikut.

$$Y = -8,16 + 0,710 X_1 - 0,013 X_2 - 0,077 X_3 + 0,021 X_4 - 0,011X_5$$

Mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan, dilakukannya uji F, dengan hasil dapat dilihat pada Tabel 4.11, sebagai berikut.

Tabel 6 Data Hasil Uji F

<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>	
<i>F-statistic</i>	466.430
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000

Sumber: Data sekunder, diolah Eviews, 2024

Berdasarkan hasil uji F, besar nilai probabilitas dan $F_{Statistic}$ sebesar $0,000 < 0,05$ dan $466,43 < F_{tabel} 2,731$ ($\alpha=0.05$, $df_1= 5$ dan $df_2=264$).

Mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial, dilakukannya uji t, dengan hasil dapat dilihat pada Tabel 7, sebagai berikut.

Tabel 7 Data Hasil Uji t

<i>Variable</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
-----------------	--------------------	--------------

X1	25.623	0.000
X2	-0.181	0.856
X3	-8.380	0.000
X4	0.942	0.347
X5	-0.415	0.678

Sumber: Data sekunder, diolah Eviews, 2024.

Dilakukannya uji determinasi untuk mencari besar pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Dapat dilihat pada Tabel 7, sebagai berikut.

Tabel 8 Data Hasil Uji Determinasi
Cross-section fixed (dummy variables)

<i>R-squared</i>	0.983
<i>Adjusted R-squared</i>	0.981

Sumber: Data sekunder, diolah Eviews, 2024.

Berdasarkan hasil uji determinasi besar faktor pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023, sebesar 98.3%. Sisanya sebesar 0,17%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Bagian 1: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Secara Simultan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023

Berdasarkan data hasil Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Dilakukannya uji F untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai konstanta sebesar -8,16 menandakan bahwa tanpa adanya variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3), Dana Bagi Hasil (X_4) dan Jumlah Penduduk (X_5), maka variabel kinerja pemerintah daerah (Y) akan menurun sebesar 8,16.

Hasil uji F besar nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$, serta nilai $F_{statistic}$ sebesar $0,000 < 0,05$ dan $466,43 < F_{tabel} 2,731$ ($\alpha=0.05$, $df_1=5$ dan $df_2=264$). Menandakan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, model penelitian telah sesuai yang menandakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk. Serta besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 98.3%. Sisanya 0.17% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur berdasarkan tingkat kemandirian keuangan daerah (Sugiyanto dan Musfirati, 2021). Dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan, menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Pradana dan Handayani, 2023).

Bagian 2: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai variabel pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Berdasarkan uji regresi linier berganda, nilai koefisien regresi X_1 sebesar 0,710. Menandakan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), mengalami peningkatan 1, maka variabel kinerja keuangan daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,710.

Dilakukannya uji t untuk mencari hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Nilai probabilitas $0,00 < 0,05$ dan $t_{statistic} 25,62 > t_{tabel} 1,969$ ($\alpha=0.05$, $df= 268$), dengan arah positif. Hal tersebut berarti bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, menandakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketika terjadi peningkatan pendapatan asli daerah maka akan meningkat pula

kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah sendiri merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain (Indonesia, 2004). Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang lebih baik. Ini berarti daerah tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan pendapatan asli daerah yang kuat, pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.

Pengaruhnya yang signifikan antara variabel pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah menjadi variabel kunci dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur berdasarkan rasio kemandirian daerah. Pendapatan asli daerah merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah, dimana rasio kemandirian pemerintah daerah didapat dengan membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan (Ambya, 2023: 96).

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Permatasari dan Trisnaningsih, 2022;Apridiyanti, 2019). Dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan pendapatan asli daerah (Sari dan Mustanda, 2019;Sari dan Mustanda, 2019).

Bagian 3: Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai variabel dana alokasi umum pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Berdasarkan uji regresi linier berganda, nilai koefisien regresi X_2 sebesar $-0,013$. Menandakan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel dana alokasi umum X_2 , mengalami peningkatan 1, maka variabel kinerja keuangan daerah Y akan mengalami penurunan sebesar $0,013$.

Dilakukannya uji t untuk mencari hubungan antara dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Nilai probabilitas $0,85 > 0,05$ dan $t_{statistic} 0,181 < t_{tabel} 1,969$

($\alpha=0.05$, $df= 268$), dengan arah negatif. Hal tersebut berarti bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima, menandakan dana alokasi umum berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh negatif mengindikasikan bahwa ketika terjadi kenaikan dana alokasi umum, maka terjadi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi umum sendiri merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Indonesia, 2004). Peningkatan dana alokasi umum menunjukkan bahwa pemerintah daerah, mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Disamping itu terlalu besarnya proporsi dana alokasi umum dalam anggaran daerah dapat menurunkan motivasi pemerintah daerah dalam tingkat penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Apabila pemerintah daerah terlalu bergantung pada transfer dari pusat, kemandirian fiskal mereka bisa melemah, sehingga menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh yang tidak signifikan pengaruh dana alokasi umum dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menandakan bahwa variabel dana alokasi umum bukan salah satu variabel kunci yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi umum merupakan salah satu instrumen dalam jumlah penerimaan daerah, yang dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah yang diukur berdasarkan kemandirian daerah (Ambya, 2023: 96).

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan, menyimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah (Riyadi, 2022; Sugiyanto dan Musfirati, 2021). Dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan bahwa peningkatan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah (Apridivanti, 2019).

Bagian 4: Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai variabel dana alokasi khusus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Berdasarkan uji regresi linier berganda, nilai koefisien regresi X_3 sebesar $-0,077$. Menandakan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel dana alokasi khusus X_3 , mengalami

peningkatan 1, maka variabel kinerja keuangan daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,077.

Dilakukannya uji t untuk mencari hubungan antara dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ dan $t_{statistic} 8,380 < t_{tabel} 1,969$ ($\alpha=0.05$, $df= 268$), dengan arah negatif. Hal tersebut berarti bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima, menandakan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Trend data dana alokasi khusus yang terus meningkat, tetapi pengaruhnya negatif terhadap kemandirian daerah. Hal tersebut terjadi ketika daerah lebih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini bisa mengurangi inisiatif daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengembangkan sumber daya lokal secara mandiri. Disamping itu penggunaan dana alokasi khusus cenderung digunakan untuk proyek-proyek fisik seperti pembangunan infrastruktur. Sementara itu, aspek lain yang juga penting untuk kemandirian daerah, seperti pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal, mungkin kurang mendapat perhatian. Dimana hal tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah.

Pengaruh negatif antara variabel dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Mengindikasikan bahwa peningkatan dana alokasi khusus memengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Indonesia, 2004). Peningkatan dana alokasi khusus mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keuangan dalam kegiatan yang bersifat khusus.

Pemberian dana alokasi khusus yang besar dapat membuat daerah menjadi lebih bergantung pada pemerintah pusat untuk pembiayaan proyek-proyek penting. Ketergantungan ini bisa mengurangi insentif bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mencari sumber pendapatan lain yang mandiri. Daerah yang terlalu bergantung pada dana alokasi khusus (DAK) mungkin kurang terdorong untuk berinovasi dalam mencari solusi pembiayaan lokal atau mengembangkan potensi ekonomi daerah

mereka sendiri. Dimana hal tersebut dapat menurunkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga menurunkan kemandirian pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

Pengaruhnya yang signifikan antara variabel dana alokasi khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) menjadi variabel kunci dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur berdasarkan rasio kemandirian daerah. Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi jumlah penerimaan suatu daerah (Ambya, 2023: 96). Dengan besarnya penerimaan daerah maka dapat menurunkan kinerja keuangan yang diukur dengan kemandirian daerah. Mengingat bahwa kemandirian didapat dari pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah penerimaan daerah.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah (Riyadi, 2022). Dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan yang menyebutkan bahwa peningkatan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap penurunan kinerja pemerintah daerah (Siti Aisyah, 2019).

Bagian 5: Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai variabel dana bagi hasil pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Berdasarkan uji regresi linier berganda, nilai koefisien regresi X_4 sebesar 0,021. Menandakan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel dana bagi hasil X_4 , mengalami peningkatan 1, maka variabel kinerja keuangan daerah Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,021.

Dilakukannya uji t untuk mencari hubungan antara dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Nilai probabilitas $0,34 > 0,05$ dan $t_{statistic} 0,942 < t_{tabel} 1,969$ ($\alpha=0.05$, $df= 268$), dengan arah positif. Hal tersebut berarti bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, menandakan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh positif dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Mengindikasikan bahwa ketika terjadi peningkatan dana bagi hasil maka kinerja

keuangan pemerintah daerah akan meningkat. Dana bagi hasil sendiri merupakan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Indonesia, 2004). Dana bagi hasil menyediakan sumber pendapatan tambahan bagi daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan proyek-proyek lain yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dana bagi hasil, daerah memiliki lebih banyak dana untuk menjalankan program-program pemerintah daerah, yang dapat memperkuat kemandirian finansial mereka.

Pengaruh dana bagi hasil yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menunjukkan bahwa dana bagi hasil bukan variabel kunci dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah, pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Dana bagi hasil (DBH) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi jumlah penerimaan suatu daerah (Ambya, 2023: 96).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja kemandirian pemerintah daerah (Novitasari dan Novitasari, 2019; Machfud, Asnawi, dan Naz'aina, 2021). Dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan dana bagi hasil berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Bagian 6: Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai variabel jumlah penduduk pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Berdasarkan uji regresi linier berganda, nilai koefisien regresi X_5 sebesar 0,011. Menandakan bahwa apabila nilai variabel lain konstan dan variabel jumlah penduduk X_5 , mengalami peningkatan 1, maka variabel kinerja keuangan daerah Y akan mengalami penurunan sebesar 0,011.

Dilakukannya uji t untuk mencari hubungan antara jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023. Nilai probabilitas $0,67 > 0,05$ dan $t_{statistic} 0,415 < t_{tabel} 1,969$ ($\alpha=0.05$, $df= 268$), dengan arah positif. Hal tersebut berarti bahwa H_a ditolak dan H_0

diterima, menandakan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah penduduk bukan menjadi variabel kunci dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur berdasarkan kemandirian daerah

Jumlah penduduk berpengaruh negatif jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menandakan bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung mengalami tekanan pada sumber daya alam, seperti air, lahan, dan energi. Kebutuhan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.

Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk memberikan dampak negatif terhadap kemandirian daerah. Kualitas penduduk yang rendah biasanya berbanding lurus dengan rendahnya kemampuan inovasi dan daya saing. Daerah yang penduduknya kurang berpendidikan atau kurang terampil akan kesulitan bersaing dengan daerah lain, baik dalam menarik investasi maupun mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan. Dengan rendahnya kualitas penduduk sering kali memaksa daerah untuk lebih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU). Ketergantungan ini mengurangi inisiatif daerah untuk mencari dan mengembangkan sumber pendapatan sendiri, sehingga menghambat upaya untuk mencapai kemandirian.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Rofiq dan Arza, 2021). Dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat memengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah (Prasetyo dan Rahayu, 2019).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut.

- 1) Pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, jumlah penduduk dan kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki tren meningkat. Sedangkan dana

alokasi umum pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023, memiliki tren menurun;

- 2) Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023;
- 3) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi umum dan jumlah penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat saran dalam penelitian ini, sebagai berikut.

- 1) Pendapatan asli daerah merupakan variabel kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur berdasarkan rasio kemandirian. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi serta pengelolaan sumber daya secara optimal;
- 2) Pengaruh dana alokasi umum yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penurunan dana alokasi umum dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga meningkatkan tingkat kemandirian daerah;
- 3) Pengaruh negatif dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penurunan dana alokasi khusus dapat menunjukkan hal positif mengingat dengan dana alokasi khusus dapat meningkatkan kemandirian daerah. Pengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga meningkatkan tingkat kemandirian daerah;
- 4) Pengaruh dana bagi hasil yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengoptimalan sumber daya mampu meningkatkan dana bagi hasil, sebagai salah satu komponen penerimaan daerah, sehingga meningkatkan kemandirian daerah;

- 5) Peningkatan jumlah penduduk, mampu meningkatkan penggunaan sumber daya, yang dapat menurunkan penerimaan. Tetapi peningkatan penerimaan dapat dilakukan dengan pengoptimalan penerimaan pajak dan retribusi, sebagai salah satu keunggulan dari peningkatan jumlah penduduk.

DAFTAR REFERENSI

- Alma, Lucky Radita. 2019. *Ilmu Kependudukan*. Malang: Wineka Media.
- Amaradila, Mike, Arif Hartono, Dan Titin Eka Ardiana. 2023. "Pengaruh Pad, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2021." *Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 7(2):253–67. Doi: 10.24269/Iso.V7i2.2187.
- Ambya. 2023. *Ekonomi Keuangan Daerah*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Amna, Radhiah. 2022. *Kependudukan*. Medan: Uinsu Press.
- Andirfa, Mulia. 2018. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Apridiyanti, Ajeng. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017." *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 4(3):32–41. Doi: 10.29407/Jae.V4i3.12822.
- Ardhana, Muhammad Anugrah. 2023. "Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan." *Management And Accounting Research Statistics* 3(1):84–105. Doi: 10.59583/Mars.V3i1.23.
- Cut, Lidya Mutia. 2021. *Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Jumlah Penduduk, Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Serta Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara*. Medan.
- Fintari, Savita. 2020. "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb)." *Jiapi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia* 1(1):59–68. Doi: 10.33830/Jiapi.V1i1.2.
- Ihsan, Muhammad Ali Al. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah Terhadap Kinerja Keuangan Di Indonesia." *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)* 2(1).
- (Indonesia, Pemerintah Pusat). 2004. *Undang-Undang (Uu) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Indonesia: Ln. 2004/ No. 126, Tln No.4438, Ll Setneg : 44 Hlm.

- Ismayasari, Candra, Yuwita Ariessa, Dan Wikan Budi. 2024. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi, Dana Umum, Alokasi Khusus Dan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2016-2023." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi P-Issn : 3047-2792* 1(4).
- Kosmaryat, Chandra Arinda Handayani, Refinanda Nur Isfahani, Dan Edy Widodo. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Indonesiatahun 2011-2016 Dengan Regresi Data Panel." *Indonesian Journal Of Applied Statistics* 2(1).
- Kusumaningrum, Enggar Bayu, Dan Hari Sugiyanto. 2021. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal Stress, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 27(2).
- Machfud, Machfud, Asnawi Asnawi, Dan Naz'aina Naz'aina. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh." *J-Mind (Jurnal Manajemen Indonesia)* 5(1):14. Doi: 10.29103/J-Mind.V5i1.3423.
- Novitasari, Maya, Dan Lita Novitasari. 2019. "Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah." *Inventory: Jurnal Akuntansi* 3(2):174. Doi: 10.25273/Inventory.V3i2.5244.
- Oki, Kamilaus Konstanse. 2023. *Otonomi Dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Pt. Pusat Literasi Dunia.
- Padang, Novi Natalia, Dan Wendi Suprpto Padang. 2023. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 303–18. Doi: 10.54367/Jrak.V9i2.2985.
- Permatasari, Dessy Ari, Dan Sri Trisnarningsih. 2022. "Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22(3):1573. Doi: 10.33087/Jiubj.V22i3.2581.
- Pradana, Era Yunian, Dan Nur Handayani. 2023. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Jiaku)* 2(2):192–209. Doi: 10.24034/Jiaku.V2i2.5979.
- Prasetyo, Aryadhani, Dan Dewi Rahayu. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dan Fiscal Stress Terhadap Tingkat Kemandirian Di Provinsi Kalimantan Selatan." *Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 2(4):872. Doi: 10.20527/Jiep.V2i4.1222.
- Riyadi, Wulan. 2022. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat." *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 3(1):298–314. Doi: 10.31949/J-Aksi.V3i1.2143.

- Rofiq, Inul, Dan Fefri Indra Arza. 2021. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Skpd, Belanja Pegawai Dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3(3):705–19. Doi: 10.24036/Jea.V3i3.414.
- Rohmah, Zuni Miftakhur. 2021. *Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pad.* Jombang: Lppm Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah.
- Sadat, Anwar. 2022. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan.* Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, Ni Made Diah Permata, Dan I. Ketut Mustanda. 2019. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8(8):4759. Doi: 10.24843/Ejmunud.2019.V08.I08.P02.
- Siti Aisyah. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012-2018." *Journal Of Accounting, Finance, And Auditing* 1(2). Doi: 10.37673/Jafa.V1i2.314.
- Sugiyanto, Hari Sugiyanto, Dan Anikmah Musfirati. 2021a. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah." *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi* 5(1):20–36. Doi: 10.35837/Subs.V5i1.1382.
- Sugiyanto, Hari Sugiyanto, Dan Anikmah Musfirati. 2021b. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah." *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi* 5(1):20–36. Doi: 10.35837/Subs.V5i1.1382.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ Capry Dudellah Rode, Irdha Yusra. "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA", INA-Rxiv, 2019

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On